

**PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PEMERINTAH
YANG LEBIH BERKUALITAS**

Dr. Jan Hoesada, CPA - Anggota KSAP

DAFTAR ISI

	Halaman
1. PENDAHULUAN	1
2. TUJUAN RAKERNAS	1
3. STRATEGI INFORMASI	3
3.1. Tatakelola TI (IT Governance)	3
3.2. Arsitektur TI	3
3.3. Ekonomi TI	3
3.4. Arsitektur SDM TI	3
3.5. Strategi Benih Unggul (<i>Breeder Strategy</i>)	3
3.6. Struktur Organisasi TI	4
4. STRATEGI MEMERANGI PERKECUALIAN	4
5. USULAN KEPADA KOMISI IV	10
6. STRATEGI IMPLEMENTASI PP 71 FULL ACRUAL	25
7. STRATEGI MEMBANGUN KOMITMEN	26
8. PENUTUP	27

**PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PEMERINTAH
YANG LEBIH BERKUALITAS**

Dr. Jan Hoesada, CPA- Anggota KSAP



1. PENDAHULUAN

Makalah Rakernas disajikan sebagai **pemantik gagasan** konstruktif dari hadirin sekalian tanpa perlu disetujui hadirin. Hadirin hendaknya tidak terbelenggu oleh makalah ini, dengan bebas dapat mengajukan proposisi/usulan berlainan bahkan berseberangan dengan makalah ini, dan marilah kita bahas berbagai gagasan & usulan itu pada sidang Komisi IV dalam suasana demokratis.

Segala aspek positif dan hal yang baik dari makalah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan Rapat Kerja Nasional Akuntansi kali ini, segala aspek makalah yang tak bersesuaian dengan Propenas, Kebijakan Khusus Keuangan Negara & Akuntansi, segala aspek makalah yang tak sesuai dengan cetak biru implementasi PP 71 KL & Pemda, hendaknya diabaikan sambil dimaafkan.

2. TUJUAN RAKERNAS

2.1. Membangun kerjasama kolaboratif antar KL dibawah koordinasi Kementerian Keuangan cq Direktorat APK untuk mencapai target opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” paling lambat untuk LK Pemerintah Pusat per tanggal 31 Desember 2012 dalam basis akuntansi Kas-Menuju-Akrual.

Rakernas merumuskan bantuan khusus, SD khusus, cetak-biru APBN khusus akuntansi bagi semua KL, APBN amat khusus bagi KL berkinerja paling tertinggal dalam program pengejaran-perolehan opini Wajar-Tanpa-Pengecualian BPK dalam basis akuntansi Kas-Menuju-Akrual.

2.2. Membangun komitmen berbasis program kerja tersepakati dalam Rakernas Akuntansi tentang (1) proses akuntansi & pelaporan LK dan (2) pemeriksaan internal inspektorat jenderal terhadap akuntansi & LK interim seluruh Kementerian-Lembaga dan Instansi dalam lingkungan Pemerintah Pusat, agar seluruh KL sederap-selangkah-setujuan mencapai target tersebut di atas.

2.3. Membangun kerjasama kolaboratif antar inspektorat jenderal dalam melaksanakan *audit-kinerja-akuntansi & audit-kinerja-pelaporan LK* di bawah koordinasi BPKP & Kementerian Keuangan cq Inspektorat Jenderal Depkeu, untuk menjamin sasaran butir 1 di atas tercapai tanpa cacat-cela. Rakernas merumuskan bantuan khusus, SD khusus, APBN khusus kepada audit internal KL berkinerja paling tertinggal dalam program pengawalan-akuntansi mengejar perolehan opini Wajar-Tanpa-Pengecualian.

- 2.4. Rakernas Akuntansi melakukan (1) pemetaan hambatan & kesulitan yang dihadapi tiap KL dalam mendekati sasaran *perolehan opini LK Wajar Tanpa Pengecualian* melalui kuesioner atau survey KL via internet, (2) peringkasan hambatan & kesulitan umum lintas KL, yang akan dibahas dalam Rakernas Akuntansi, untuk memperoleh solusi-manjur dan pasti-berhasil, serta merumuskan berbagai jenis & besar belanja yang dibutuhkan untuk solusi masalah tersebut pada RAPBN 2012.

Makalah ini terfokus pada solusi terhadap temuan & perkecualian BPK. Puncak makalah tersaji pada Bab 5.

- 2.5. Rakernas akuntansi dihadiri para SPI lintas KL, BPKP & para SPI senior bersama-sama merumuskan *strategi audit internal untuk mengawal (menjamin) perolehan Opini Audit WTP pada tiap KL*.
- 2.6. Apabila Rakernas Akuntansi mencakupi Pemerintah Daerah Otonom, maka berbagai paragraf tersebut di atas dapat dimaknai berlaku bagi Departemen Dalam Negeri, KL dapat dimaknai Entitas Pelaporan LK Pemda, sedang Inspektorat Jenderal dapat dimaknai sebagai SPI Depdagri dan SPI tiap Propinsi sebagai koordinator SPI Pemda.
- 2.7. Rakernas Akuntansi membahas Cetak Biru atau *Road Map* menuju LK Berbasis Akrual-Paripurna PP tahun buku berakhir 2014 sebagai LK pertama sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Paripurna – Lampiran 1- PP 71-2010. Road map menjelaskan Tahap Utama dan/atau Kegiatan Utama tahun 2012 dan 2013 untuk menjamin proses-akuntansi-akrual-paripurna dapat dimulai serentak seluruh KL pada tanggal 2 Januari 2014 (sebagai tahun percobaan) dan proses-mantap-akrual-paripurna per tanggal 2 Januari 2015 (sebagai tahun resmi atau tahun pertama resmi proses-akuntansi-akrual-paripurna sesuai amar PP 71-2010).

Bab 3 makalah berjudul Strategi Informasi, menyajikan berbagai konsep penting untuk bahan penyusunan Strategi Implementasi PP 71 tahun 2010, mengambil hikmah buah pikiran William J.Gilbert dalam buku teks berjudul IT Strategy.

- 2.8. Apabila Rakernas Akuntansi mencakupi Pemerintah Daerah Otonom, Depdagri memaparkan dan memantapkan Road Map bagi Seluruh Pemda, sesuai atau mengambil hikmah paragraf tersebut diatas.
- 2.9. BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan bersama Inspektorat seluruh KL lain memantapkan kembali *Computer Audit Berbasis Main Frame*. Rakernas merumuskan action plan dan dana pembangunan pembangunan *Information Control System (ICS)*, *computer audit program*, pelatihan internal auditor seluruh KL tentang seluk-beluk *mainframe cq operating system*, audit manajemen terhadap *manajemen pusat data (data centre)* & audit sistem informasi, pendampingan oleh KAP Besar & Konsultan EDP Audit yang kompeten, *program gladi resiko (internal audit menjalankan program audit eksternal cq SPKN –BPK sebagai sarana gladi resiko) pra-external audit*, perumusan jenis & besar belanja dalam RAPBN 2012 sepanjang Rakernas.

3. STRATEGI INFORMASI

3.1. Tatakelola TI (IT Governance)

- Mendaftar friksi informasi keuangan dan akuntansi, memerangi sebab perbedaan informasi, misalnya saldo aset tetap hasil berbagai sistem akuntansi.
- Pembangunan *kendali internal* informasi keuangan dan akuntansi.

3.2. Arsitektur TI

- Pembentukan aliran informasi bawah-atas, atas-bawah, informasi pada hirarki sejajar, informasi keluar entitas dan informasi masuk entitas.
- Pembangunan kemampuan-manuver (*maneuverability*) berbasis informasi real-time.

3.3. Ekonomi TI

- Identifikasi jenis transaksi keuangan yang harus dilakukan secara maya (elektronis, nirkertas, nirtatap-muka) karena alasan pembangunan *internal control*, membangun basis e-governance.
- Identifikasi penerima, pengguna, pemanfaat informasi keuangan & akuntansi.
- Identifikasi besar manfaat.
- Identifikasi biaya informasi.
- Membangun kesadaran skala keekonomian suatu sistem informasi, cost-benefit setiap sistem informasi keuangan & akuntansi.

3.4. Arsitektur SDM TI

- Pembangunan SDM pendukung sistem keuangan dan sistem informasi keuangan & akuntansi yang telah ada sekarang.
- *Knowledge worker strategy*; strategi perekrutan karyawan baru bidang SPI, keuangan & akuntansi berkeakhlian IT.
- Pembangunan *budaya IT & IC* pada seluruh SDM SPI, keuangan & akuntansi KL dan Pemda.
- Pembangunan **Daftar Pemasok IT** terbaik pada pemerintah pusat dan tiap pemda, strategi aliansi penggunaan konsultan IT bersama-sama (*cost sharing strategy*), misalnya beberapa Pemda menggunakan konsultan sistem akuntansi patungan.

3.5. Strategi Benih Unggul (*Breeder Strategy*)

- Strategi pembangunan rasa tanggungjawab & komitmen, strategi alokasi kekuasaan/wewenang keuangan untuk *checks & balance*, *strategi demokratisasi*, *transparansi & akuntabilitas keuangan*, strategi pemberdayaan berbasis 3E tiap subfungsi keuangan & akuntansi, strategi pembangunan kerjasama sinergistik bidang keuangan & akuntansi lintas KL dan pemda.
- Strategi pembangunan kompetensi keuangan & akuntansi tiap departemen-lembaga (entitas pelaporan LK), pemda atau tiap suborganisasi (entitas akuntansi).

3.6. Struktur Organisasi TI

- Pembangunan struktur organisasi informasi keuangan dan akuntansi sebagai basis *unity of IT Policy* lingkungan pemerintah pusat dan lingkungan pemda, mengurangi konflik kepentingan & disharmoni kegiatan keuangan & akuntansi lintas KL & Pemda, membangun komitmen berorientasi kualitas manajemen keuangan & akuntansi.
- Reorganisasi struktur organisasi informasi keuangan secara berkala.
- Pembangunan forum kerjasama, rakernas keuangan & akuntansi, pembangunan masyarakat informasi keuangan & akuntansi lingkungan pemerintahan dengan strategi information sharing, technology sharing dan *problem solving* hambatan penerapan UU Keuangan Negara dan PP 71.
- Pembangunan *automatic control system*, misalnya (1) atasan yang tak menerima laporan elektronik tertentu pada jadwal laporan tertentu, dipastikan menerima peringatan dari sistem, sehingga dapat memanggil & menegur bawahan, (2) tanda-tanda bahaya secara elektronik misalnya tanggal eksekusi keuangan, batas waktu hak menggunakan suatu dana, peringatan elektronik kelambatan setoran PNPB atau dana anggaran tak digunakan ke Kas Negara, tanda realisasi anggaran mendekati jumlah plafond mata-anggaran-tersebut, penguncian elektronik penggunaan mata anggaran berlebih untuk defisit mata anggaran lain
- Strategi gawat darurat informasi keuangan dan akuntansi, misalnya strategi mengatasi serangan virus.
- Pembangunan data center, strategi data sharing, GFS dan berbagai informasi terkait keuangan & akuntansi.

4. STRATEGI MEMERANGI PERKECUALIAN

Inilah pokok acara atau tugas Komisi IV, yang harus dijawab dalam waktu sangat pendek oleh hadirin peserta Komisi IV:

1. Bagaimana strategi menghapus temuan SPI & BPK tersebut ?
2. Bagaimana strategi pencegahan ?
Bagaimana membangun kesadaran KL/Pemda yang belum terkena perkecualian tersebut dalam LK nya, namun berisiko tertimpa pengecualian BPK pada daftar temuan di bawah ini ?
3. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh K/L dan Pemda agar SPI dan BPK tak mungkin menemukan atau menemukan kembali pelanggaran dan kesalahan keuangan & akuntansi pada daftar di bawah ini ?

Makalah menghapus identitas KL dan jumlah Rupiah temuan SPI dan BPK.
Daftar temuan SPI dan BPK adalah sbb:

1. Akuntansi

Pada umumnya, KL tak mencapai opini optimal WTP dari BPK karena manajemen anggaran, bukan semata-mata karena kualitas catatan akuntansi & pelaporan LK.
Karena anggaran merupakan hulu proses akuntansi, maka proses akuntansi menerima berbagai transaksi realisasi anggaran carut-marut (istilah dari BPK).

Inventarisasi aset tetap tak mencakupi 100% aset tetap yang dimiliki.
Hibah uang tidak dicatat.
Hibah oleh PT tidak dicatat.

Sistem persediaan dan pencatatan persediaan lemah.

Uang hibah belum dicatat dan Barang Milik Negara yang bersumber dari hibah Pemprov belum diproses Hibah kepada DJPU
Universitas menerima dana hibah/kerja sama dari Pemerintah Provinsi namun tidak dicatat.

BMN belum didukung bukti kepemilikan kendaraan, tanah dan gedung dll., sebagian BMN tak jelas status & dalam sengketa.

BMN belum dimanfaatkan.

Hasil pengadaan buku belum disalurkan sama sekali, disimpan digudang dan DVD Pedoman Penulisan Puisi disimpan di Bagian Rumah Tangga.

Penghapusan catatan BMN tanpa seijin Menkeu belum ditindaklanjuti dengan proses penghapusan.

Kendaraan bermotor hilang belum ditindaklanjuti dengan tuntutan ganti rugi.

Proses Pengintegrasian Laporan Keuangan Satker PK-BLU belum memadai.

Pengakuan Realisasi Belanja Badan Layanan Umum (BLU) tidak memperhatikan Prinsip *Cut Off, sehingga* mengakibatkan realisasi belanja BLU disajikan terlalu rendah (*understated*).

Pencatatan dan pelaporan PNPB kementerian tertentu belum memadai untuk memastikan keakuratan PNPB yang dilaporkan.

Tidak seluruh Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dapat diinput.

Universitas ttt belum dapat mencatat Realisasi Belanja Hibah dari Islamic Development Bank (IDB).

Pengelolaan dan Pencatatan Piutang belum memadai.

Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan lemah.

Penambahan nilai Aset Tetap belum dikapitalisasi.

Sistem Pengendalian Intern atas penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian ttt belum memadai

- Perbedaan nilai aset tetap yang dilaporkan dalam SAK dan SIMAK-BMN
- Selisih antara Belanja Modal dengan Penambahan Aset
- Aset Tetap hasil perolehan belanja dan hibah belum dicatat dalam neraca
- Satker tidak memiliki SOP pengelolaan aset
- Aset yang tidak dikuasai masih tercatat di neraca
- Penghapusan Barang Milik Negara

Pelaksanaan Penilaian Kembali Aset Tetap di Lingkungan Kementerian ttt belum selesai dan terdapat Aset Tetap yang tidak masuk dalam inventarisasi dan revaluasi.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) belum memberikan informasi yang memadai Kurang catat SSBP.

Kesalahan klasifikasi belanja:

- a. Belanja barang yang menghasilkan aset tetap
- b. Belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap
- c. Anggaran belanja barang yang direalisasikan sebagai bantuan sosial

Dokumen sumber pengembalian belanja tidak dapat diinput di SAI.

Penggunaan rekening penampungan belum tertib: 151 rekening belum mendapatkan ijin Kemenkeu dan sebagian belum disajikan dalam LK.

Belum ada SOP penentuan piutang di PTN.

Pencatatan dan pelaporan persediaan belum didukung penatausahaan persediaan yang memadai, sehingga terdapat persediaan yang belum dicatat.

Ada perbedaan nilai aset tetap antara SAK dan SIMA-BMn.

Terdapat selisih antara LKKL dengan Laporan Barang Pengguna pada DJKN.

Aset tetap yang tidak dikuasai oleh Kementerian ttt tetapi masih tercatat di neraca kementerian.

Aset tetap yang belum diinput dalam SIMAK BMN

2. Keuangan

2.1. Anggaran

Pengadaan barang atau jasa tidak terencana & tidak terpantau dengan baik.

2.2. Realisasi Anggaran

Rakernas hendaknya meminta seluruh K/L & Pemda melakukan telaah (review) bulanan untuk PNBPN, dana bantuan sosial, tunjangan profesi, beasiswa dan dana lain yang tak berhasil disalurkan, alasan dana tidak disalurkan dan solusi mendasar masalah tersebut.

Rakernas hendaknya meminta kepada seluruh K/L & Pemda untuk melakukan telaah (review) bulanan dana tak tersalurkan dan dana yang wajib segera disetor ke kas negara

Realisasi volume pekerjaan pengadaan barang atau ternyata kurang.

Pengadaan barang dan jasa tidak selesai dan berpotensi memboroskan keuangan negara . Jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dicairkan.

Kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan pengadaan barang dan/atau Jasa percetakan, pengadaan bahan kimia, rehabilitasi laboratorium, penimbunan area, pembangunan gedung tahap tertentu dll.

Kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa

Pembayaran tidak sesuai spesifikasi kontrak rehabilitasi gedung, sewa bandwidth, tayangan iklan, pelatihan dan pengadaan software ttt.

Pembayaran ganda atas belanja honorarium dan perjalanan dinas pada Satker tidak diyakini kewajarannya.

Realisasi perjalanan dinas diragukan pelaksanaannya.

Pembayaran ganda atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.

Pembayaran lebih atas biaya perjalanan dinas pegawai.

Duplikasi pertanggungjawaban belanja kegiatan rapat

Pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Pembayaran ganda atas kegiatan penyaluran subsidi

Pembayaran ganda atas kegiatan penyaluran beasiswa.

Sisa Dana Bantuan Sosial yang tidak tersalurkan (Mengendap di Pihak Ketiga) belum disetor ke Kas Negara.

Sisa Dana Bantuan Sosial (block grant) belum disetor ke Kas Negara.

Sisa dana pada Program belum disetorkan ke Kas Negara.

Sisa dana di Bank Operasional KPPN belum disalurkan, belum disetor ke Kas Negara.

Retur tunjangan fungsional guru, profesi pendidik dan tunjangan khusus belum disetor ke kas negara.

Penyaluran beasiswa rangkap.

Kelebihan pembayaran dana BOS.

Pembayaran Belanja Bantuan Sosial pada Dinas melebihi standar yang ditetapkan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Program tidak sesuai RKA-KL Belanja Bantuan Sosial belum disalurkan.

Belanja yang menghasilkan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud untuk Operasional Satker Dianggarkan dari MAK 52 dan MAK 57 serta Belanja Modal Tidak Menghasilkan Aset Tetap

2.3. Kegiatan Keuangan

Denda keterlambatan belum dikenakan.

Perjalanan dinas tidak wajar, fiktif atau diragukan kebenarannya.

Honor ganda.

Pengelolaan piutang tidak memadai.

PNBP/Pungutan Kementerian Lembaga (KL) yang Tidak Disetorkan ke Kas Negara, Tidak dilaporkan dan Digunakan Langsung Tanpa Melalui Mekanisme APBN.

PNBP diterima oleh satker dan masuk ke rekening penerimaan yang dikelola oleh bendaharawan penerimaan/rektor, namun tidak disetorkan ke Kas Negara melainkan digunakan langsung untuk melaksanakan kegiatan.

PNBP yang digunakan langsung tidak melalui rekening bendahara penerima.

PNBP di atas Rp.10 Triliun pertahun dikelola BLU di luar mekanisme APBN. Transaksi keuangan BLU yang bersumber dari pendapatan usaha berupa jasa layanan, hibah, pendapatan APBN, dan pendapatan usaha lainnya wajib dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran K/L dan Pemerintah. Oleh karena itu transaksi tersebut harus disahkan oleh KPPN dengan mekanisme SPM dan SP2D Pengesahan setiap triwulan.

Bantuan dari Pemprov dan penerimaan dari kerjasama dengan pihak swasta, luar negeri diterima di rekening rektor namun digunakan langsung.

Jasa giro dan pendapatan terlambat diterima pada berbagai PT.

Universitas melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) bidang pendidikan tahun dengan beberapa kabupaten/kota terdapat PKS yang belum dilunasi.

Hibah dari pemda tersebut diterima langsung di masing-masing fakultas/pusat/lembaga dan tidak dilaporkan kepada Rektorat, sehingga belum diproses penerimaan hibahnya kepada DJPU.

Pengadaan barang tertentu belum dapat dimanfaatkan.

Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dan Biaya Akomodasi/Konsumsi.

Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya.

Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan bukti, melebihi SBU dan biaya rangkap.

Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan manifest yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan.

Pembayaran lebih atas Tunjangan Fungsional yang dianggarkan.

Realisasi belanja pegawai diberikan kepada pegawai yang sudah diberhentikan.

Terdapat sisa uang belanja lauk pauk pegawai dari bulan Januari s/d Desember.

Pemborosan atas Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buffer Stock.

HPS/OE meubelair asrama mahasiswa yang melebihi harga pasar/wajar.

Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan dan belum disetor ke Kas Negara.

Sekitar 50.000 Instansi/Lembaga/Perorangan penerima Bantuan Sosial belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan pertahun anggaran.

Penyaluran Bantuan Sosial tidak sesuai peruntukannya atau tidak tepat sasaran.

Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Provinsi dibayarkan kepada sekolah yang tidak berhak.

Penggunaan dana penelitian yang tidak sesuai ketentuan mengakibatkan indikasi kerugian negara dan hak peneliti atas dana hibah penelitian berkurang serta penggunaannya di fakultas tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tertundanya penerimaan negara atas jasa giro.

Pertanggungjawaban Belanja tidak lengkap, realisasi belanja negara belum/tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Tunjangan Profesi dan Tagihan Beasiswa kurang dibayar.

Harga Eceran Tertinggi atas buku teks pelajaran hasil Pengalihan Hak Cipta belum ditetapkan sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan berpotensi pemborosan.

Penggunaan Rekening yang tidak memiliki izin Kementerian Keuangan.

Server tidak efektif dan adanya kendala-kendala yang terjadi pengadaan server kontens berpotensi tidak termanfaatkan.

Mobil penyiaran belum dapat dimanfaatkan untuk praktik kuliah mahasiswa.

Gedung dan bangunan laboratorium *Advance Fire Fighting* (AFF) yang belum dimanfaatkan.

84 item barang hasil pengadaan peralatan peningkatan infrastruktur jaringan akses tanpa kabel sebesar belum dipergunakan dan masih disimpan (belum ada ruangan).

13 set barang hasil pengadaan peralatan laboratorium hotel engineering tahap II belum dipergunakan dan masih tersimpan karena belum dilakukan instalasi.

1 unit Hydro Turbin dengan merk Dastel PL50012 dalam kondisi rusak.

Microhydro Simulation tersebut belum dapat digunakan.

Terdapat 29 unit barang hasil pengadaan peralatan laboratorium komputer akuntansi belum dipergunakan dan masih tersimpan karena menunggu penyelesaian renovasi ruangan laboratorium akuntansi.

Tukar Menukar Aset Negara Antara Universitas dan suatu pemangku kepentingan tidak mengacu pada prinsip seimbang.

Pemanfaatan BMN tidak sejjin Menkeu, belum memberikan kontribusi dan digunakan di luar kesepakatan.

Pemanfaatan rumah gol I tidak sesuai ketentuan.

PNBP BLU belum disahkan.

Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum belum memadai.

Tujuan pengalihan Hak Cipta Buku Teks Pelajaran oleh Pusat Perbukuan untuk buku murah tidak tercapai.

Mekanisme penggunaan rekening Rektor untuk menampung dana Kerjasama/ Beasiswa tidak memadai.

Pencatatan dan Pengelolaan Kas di Lingkungan Kementerian ttt belum memadai.

Retur belanja bantuan sosial belum disalurkan.

Realisasi belanja tidak didukung bukti yang lengkap.

3. KENDALI INTERNAL

Pengendalian atas penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang Sekolah Dasar lemah.

Pengamanan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Beberapa Satker Kementerian Pendidikan Nasional belum memadai.

Pengendalian intern atas pengadaan jasa sewa bandwidth dan kelengkapannya kurang memadai.

SPI atas akun aset tetap dalam penyusunan LK belum memadai.

4. SDM

SDM kurang kredibel.

5. USULAN KEPADA KOMISI IV

Pemakalah sengaja menyajikan temuan BPK tersebut di atas apa adanya, agar hadirin memperoleh gambaran umum sesuai kondisi lapangan.

Pemakalah lalu melakukan pemilahan seluruh temuan BPK tersebut diatas dalam kelompok-kelompok masalah atau pos LRA, Neraca dan LKK, agar RAKERNAS lebih mudah membahas dan mencari solusi masalah. Temuan BPK dikelompokkan dalam kelompok akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap, akuntansi umum, akuntansi pendapatan dan lain-lain, sebagaimana tersaji di bawah ini. Karena jadwal waktu diskusi Komisi IV amat pendek, maka pemakalah menyajikan usulan solusi masalah kepada sidang yang terhormat. Usulan solusi sekadar sebagai *pemantik gagasan pemecahan masalah*, tak perlu (selalu) disetujui sidang.

Analisis temuan BPK tersebut di atas dan usulan solusi masalah adalah sbb :

Nomor	Pengelompokan Temuan BPK	Usulan Solusi Kepada Hadirin Sidang Komisi IV
1	<p>1. ASET TETAP</p> <p>1.1. AKUNTANSI ASET TETAP</p> <p>Inventarisasi aset tetap tak mencakupi 100% aset tetap yang dimiliki.</p> <p>Hibah uang tidak dicatat.</p> <p>Hibah oleh PT tidak dicatat.</p> <p>BMN belum didukung bukti kepemilikan kendaraan, tanah dan gedung dll., sebagian BMN tak jelas status & dalam sengketa.</p> <p>BMN belum dimanfaatkan.</p> <p>Penghapusan catatan BMN tanpa seijin Menkeu belum ditindaklanjuti dengan proses penghapusan Kendaraan bermotor hilang belum ditindaklanjuti dengan tuntutan ganti rugi.</p> <p>Penambahan nilai Aset Tetap belum dikapitalisasi.</p> <p>Sistem Pengendalian Intern atas penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian ttt belum memadai</p>	<p>1. ASET TETAP</p> <p>1.1. AKUNTANSI ASET TETAP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyeragaman SOP penyelenggaraan administrasi aset tetap bagi Satker. Penyeragaman perangkat-lunak aplikasi akuntansi Aset Tetap pada KL. 2. Pembangunan kendali internal untuk memastikan seluruh belanja modal dan penerimaan hibah aset tetap menambah akun subledger baru berdasar jenis, lokasi dan pengguna aset tetap. 3. Pembuatan daftar syarat kelengkapan dokumen dasar. Pelatihan akuntansi tentang syarat kelengkapan (sesuai UU Perbendaharaan dan BPK) dokumen-dasar sebagai input data. 4. Laporan dan rapat berkala (mis. bulanan) BMN belum dimanfaatkan, penghapusan catatan BMN, kehilangan, kerusakan, penambahan nilai aset tetap belum dikapitalisasi, rekonsiliasi berbagai catatan tentang aset tetap, aset tidak dikuasai KL tetapi tercatat pd KL tersebut, program penilaian (dan/atau penilaian kembali) aset tetap, aset dalam konstruksi, evaluasi sistem pengendalian internal aset tetap pada KL & Pemda.

	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan nilai aset tetap yang dilaporkan dalam SAK dan SIMAK-BMN • Selisih antara Belanja Modal dengan Penambahan Aset • Aset Tetap hasil perolehan belanja dan hibah belum dicatat dalam neraca • Satker tidak memiliki SOP pengelolaan aset • Aset yang tidak dikuasai masih tercatat di neraca • Penghapusan Barang Milik Negara <p>Pelaksanaan Penilaian Kembali Aset Tetap di Lingkungan Kementerian ttt belum selesai dan terdapat Aset Tetap yang tidak masuk dalam inventarisasi dan revaluasi.</p> <p>Ada perbedaan nilai aset tetap antara SAK dan SIMA-BMn.</p> <p>Terdapat selisih antara LKKL dengan Laporan Barang Pengguna pada DJKN.</p> <p>Aset tetap yang tidak dikuasai oleh Kementerian ttt tetapi masih tercatat di neraca kementerian.</p> <p>Aset tetap yang belum diinput dalam SIMAK BMN</p>	
--	--	--

	<p>1.2. KEUANGAN & ANGGARAN ASET TETAP</p> <p>Pengadaan barang tertentu belum dapat dimanfaatkan.</p> <p>Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dan Biaya Akomodasi/Konsumsi.</p> <p>Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya.</p> <p>Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan bukti, melebihi SBU dan biaya rangkap.</p> <p>Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan manifest yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan.</p> <p>Pembayaran lebih atas Tunjangan Fungsional yang dianggarkan.</p> <p>Realisasi belanja pegawai diberikan kepada pegawai yang sudah diberhentikan.</p> <p>Server tidak efektif dan adanya kendala-kendala yang terjadi pengadaan server kontens berpotensi tidak termanfaatkan.</p> <p>Mobil penyiaran belum dapat dimanfaatkan untuk praktik kuliah mahasiswa.</p> <p>Gedung dan bangunan laboratorium <i>Advance Fire Fighting</i> (AFF) yang belum dimanfaatkan.</p>	<p>1.2. KEUANGAN & ANGGARAN ASET TETAP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan bulanan barang belum dapat dimanfaatkan KL & Pemda, rapat bulanan dan solusi atas barang tak dapat dimanfaatkan. 2. Pedoman kelengkapan bukti /manifest dan kewajaran pertanggungjawaban perjalanan dinas berlaku bagi seluruh KL. 3. Pembangunan kendali internal atas risiko lebih bayar PO, Faktur Pemasok, Biaya perjalanan dinas dan akomodasi, biaya rangkap, pembayaran melebihi Ketentuan Tunjangan Fungsional, risiko pembayaran kepada pemasok & karyawan fiktif.
--	--	--

	<p>84 item barang hasil pengadaan peralatan peningkatan infrastruktur jaringan akses tanpa kabel sebesar belum dipergunakan dan masih disimpan (belum ada ruangan).</p> <p>13 set barang hasil pengadaan peralatan laboratorium hotel engineering tahap II belum dipergunakan dan masih tersimpan karena belum dilakukan instalasi.</p> <p>1 unit Hydro Turbin dengan merk Dastel PL50012 dalam kondisi rusak.</p> <p>Microhydro Simulation tersebut belum dapat digunakan.</p> <p>Terdapat 29 unit barang hasil pengadaan peralatan laboratorium komputer akuntansi belum dipergunakan dan masih tersimpan karena menunggu penyelesaian renovasi ruangan laboratorium akuntansi.</p> <p>2. PERSEDIAAN</p> <p>2.1. AKUNTANSI PERSEDIAAN.</p> <p>Sistem persediaan dan pencatatan persediaan lemah.</p> <p>Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan lemah.</p> <p>Pencatatan dan pelaporan persediaan belum didukung penatausahaan persediaan yang memadai, sehingga terdapat persediaan yang belum dicatat.</p>	<p>2. PERSEDIAAN</p> <p>2.1. AKUNTANSI PERSEDIAAN</p> <p>Solusi mirip dengan aset tetap tersebut di atas.</p>
--	---	---

	<p>Terdapat selisih antara LKKL dengan Laporan Barang Pengguna pada DJKN.</p> <p>2.2. KEUANGAN & ANGGARAN PERSEDIAAN</p> <p>Pengadaan barang tertentu belum dapat dimanfaatkan.</p> <p>Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dan Biaya Akomodasi/Konsumsi.</p> <p>Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya.</p> <p>Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan bukti, melebihi SBU dan biaya rangkap.</p> <p>Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan manifest yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan.</p> <p>Pembayaran lebih atas Tunjangan Fungsional yang dianggarkan.</p> <p>Realisasi belanja pegawai diberikan kepada pegawai yang sudah diberhentikan.</p> <p>(3)Pemborosan atas Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buffer Stock.</p> <p>HPS/OE meubelair asrama mahasiswa yang melebihi harga pasar/wajar.</p>	<p>2.2. KEUANGAN & ANGGARAN PERSEDIAAN</p> <p>Solusi mirip dengan keuangan & anggaran Aset Tetap tersebut di atas.</p>
--	---	---

	<p>3. HIBAH, BANSOS, BARTER, SUMBANGAN, PUBLIKASI BUKU</p> <p>3.1. AKUNTANSI HIBAH, BANSOS, BARTER, SUMBANGAN, PUBLIKASI BUKU</p> <p>Uang hibah belum dicatat dan Barang Milik Negara yang bersumber dari hibah Pemprov belum diproses Hibah kepada DJPU.</p> <p>Universitas menerima dana hibah/kerja sama dari Pemerintah Provinsi namun tidak dicatat.</p> <p>Hasil pengadaan buku belum disalurkan sama sekali, disimpan digudang dan DVD Pedoman Penulisan Puisi disimpan di Bagian Rumah Tangga.</p> <p>Universitas ttt belum dapat mencatat Realisasi Belanja Hibah dari Islamic Development Bank (IDB).</p> <p>3.2. KEUANGAN & ANGGARAN HIBAH, BANSOS, BARTER, SUMBANGAN, PUBLIKASI BUKU</p> <p>Hibah dari pemda tersebut diterima langsung di masing-masing fakultas/pusat/lembaga dan tidak dilaporkan kepada Rektorat, sehingga belum diproses penerimaan hibahnya kepada DJPU.</p> <p>Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Provinsi dibayarkan kepada sekolah yang tidak berhak.</p>	<p>3. HIBAH, BANSOS, BARTER, SUMBANGAN, PUBLIKASI BUKU</p> <p>3.1. AKUNTANSI HIBAH, BANSOS, BARTER, SUMBANGAN, PUBLIKASI BUKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Software aplikasi akuntansi untuk hibah dan Bansos di aplikasi seragam untuk seluruh KL (termasuk Perguruan Tinggi Pemerintah), sesuai Buletin Teknis dan/atau Permenkeu tentang akuntansi hibah dan bansos. 2. Kewajiban K/L memeriksa gudang dan melaporkan barang yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat dalam kaitan dengan hibah, bansos, penyaluran buku-buku dll. 3. Pelatihan perangkat lunak (application software) untuk transaksi hibah, bansos, barter, penerusan pinjaman, subsidi dan lain-lain, bagi seluruh KL. <p>3.2. KEUANGAN & ANGGARAN HIBAH, BANSOS, BARTER, SUMBANGAN, PUBLIKASI BUKU</p> <p>Tidak ada usulan bagi manajemen keuangan/perbendaharaan</p>
--	--	---

	<p>Penggunaan dana penelitian yang tidak sesuai ketentuan mengakibatkan indikasi kerugian negara dan hak peneliti atas dana hibah penelitian berkurang serta penggunaannya di fakultas tidak dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Tukar Menukar Aset Negara Antara Universitas dan suatu pemangku kepentingan tidak mengacu pada prinsip seimbang.</p> <p>Retur belanja bantuan sosial belum disalurkan.</p> <p>4. AKUNTANSI UMUM</p> <p>4.1. AKUNTANSI UMUM</p> <p>Proses Pengintegrasian Laporan Keuangan Satker PK-BLU belum memadai.</p> <p>Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) belum memberikan informasi yang memadai Kurang catat SSBP.</p> <p>Penggunaan rekening penampungan belum tertib: 151 rekening belum mendapatkan ijin Kemenkeu dan sebagian belum disajikan dalam LK.</p>	<p>4. AKUNTANSI UMUM</p> <p>4.1. AKUNTANSI UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Software aplikasi integrasi, penggabungan, konsolidasi LK 2. Buletin teknis CALK, Pedoman penyusunan CALK, meminta pendapat BPK tentang kecukupan pedoman tersebut agar tak ada lagi perkecualian-temuan kekurangan CALK. 3. CALK memuat daftar rekening bank belum berizin Menkeu, alasan mengapa rekening dibuka tanpa izin.
--	---	---

	<p>4.2. KEUANGAN & ANGGARAN UMUM</p> <p>Realisasi volume pekerjaan pengadaan barang atau ternyata kurang. CALK Pengadaan barang dan jasa tidak selesai dan berpotensi memboroskan keuangan negara . Jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dicairkan.CALK</p> <p>Kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan pengadaan barang dan/atau Jasa percetakan, pengadaan bahan kimia, rehabilitasi laboratorium, penimbunan area, pembangunan gedung tahap tertentu dll.</p> <p>Kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa</p> <p>Pembayaran tidak sesuai spesifikasi kontrak rehabilitasi gedung, sewa bandwith, tayangan iklan, pelatihan dan pengadaan software ttt. CALK</p> <p>Pembayaran ganda atas belanja honorarium dan perjalanan dinas pada Satker tidak diyakini kewajarannya.</p> <p>Realisasi perjalanan dinas diragukan pelaksanaannya.</p> <p>Pembayaran ganda atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.</p> <p>Pembayaran lebih atas biaya perjalanan dinas pegawai.</p>	<p>4.2. KEUANGAN & ANGGARAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakernas hendaknya meminta seluruh K/L & Pemda melakukan telaah (review) bulanan untuk sisa dana yang harus disetor ke Kas Negara, berbagai PNBPN, dana bantuan sosial, tunjangan profesi, beasiswa dan dana lain yang tak berhasil disalurkan, alasan dana tidak disalurkan dan solusi mendasar masalah tersebut. Rakernas hendaknya meminta kepada seluruh K/L & Pemda untuk melakukan telaah (review) bulanan dana tak tersalurkan dan dana yang wajib segera disetor ke kas negara 2. Dibutuhkan Pedoman Akuntansi Departemen Keuangan tentang akuntansi berbagai dana tak berhasil disalurkan, contoh jurnal, contoh reklasifikasi pos, contoh tampilan dalam neraca dan penjelasan/alasan mengapa tidak berhasil disetor ke Kas Negara dalam CALK. 3. Sebagian masalah keuangan muncul karena praktik administrasi perbendaharaan, kurang-telitian petugas, kasus ditemukan BPK tak ditemukan dalam sampling audit SPI.
--	--	--

	<p>Duplikasi pertanggungjawaban belanja kegiatan rapat</p> <p>Pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan.</p> <p>Pembayaran ganda atas kegiatan penyaluran subsidi</p> <p>Pembayaran ganda atas kegiatan penyaluran beasiswa.</p> <p>Sisa Dana Bantuan Sosial yang tidak tersalurkan (Mengendap di Pihak Ketiga) belum disetor ke Kas Negara. CALK</p> <p>Sisa Dana Bantuan Sosial (block grant) belum disetor ke Kas Negara. CALK</p> <p>Sisa dana pada Program belum disetorkan ke Kas Negara.</p> <p>Sisa dana di Bank Operasional KPPN belum disalurkan, belum disetor ke Kas Negara. CALK</p> <p>Retur tunjangan fungsional guru, profesi pendidik dan tunjangan khusus belum disetor ke kas negara. CALK</p> <p>Penyaluran beasiswa rangkap.</p> <p>Kelebihan pembayaran dana BOS.</p>	
--	--	--

	<p>Pembayaran Belanja Bantuan Sosial pada Dinas melebihi standar yang ditetapkan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Program tidak sesuai RKA-KL Belanja Bantuan Sosial belum disalurkan.</p> <p>Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan dan belum disetor ke Kas Negara.</p> <p>Penyaluran Bantuan Sosial tidak sesuai peruntukannya atau tidak tepat sasaran. CALK</p> <p>Penggunaan Rekening yang tidak memiliki izin Kementerian Keuangan. CALK</p> <p>Pemanfaatan BMN tidak seijin Menkeu, belum memberikan kontribusi dan digunakan di luar kesepakatan. CALK</p> <p>Pemanfaatan rumah gol I tidak sesuai ketentuan. CALK</p> <p>Pencatatan dan Pengelolaan Kas di Lingkungan Kementerian ttt belum memadai.</p>	
--	---	--

	<p>5. LRA</p> <p>5.1. AKUNTANSI LRA</p> <p>Pada umumnya, KL tak mencapai opini optimal WTP dari BPK karena manajemen anggaran, bukan catatan akuntansi & pelaporan LK.</p> <p>Karena anggaran merupakan hulu proses akuntansi, maka proses akuntansi menerima berbagai transaksi realisasi anggaran carut-marut (istilah dari BPK).</p> <p>Pengakuan Realisasi Belanja Badan Layanan Umum (BLU) tidak memperhatikan Prinsip <i>Cut Off, sehingga</i> mengakibatkan realisasi belanja BLU disajikan terlalu rendah (<i>understated</i>).</p> <p>Kesalahan klasifikasi belanja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja barang yang menghasilkan aset tetap b. Belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap c. Anggaran belanja barang yang direalisasikan sebagai bantuan sosial <p>Dokumen sumber pengembalian belanja tidak dapat diinput di SAI.</p>	<p>5. LRA</p> <p>5.1. AKUNTANSI LRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LRA harus memenuhi unsur compliance dan 3E. Penerapan konsep TQM dan zero defect dalam manajemen anggaran, realisasi & administrasi perbendaharaan. Menggunakan tenaga konsultan TQM, membuat Pedoman TQM & Zero Defect dalam Manajemen Anggaran.
--	---	--

	<p>5.2. KEUANGAN & ANGGARAN LRA</p> <p>Belanja yang menghasilkan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud untuk Operasional Satker Dianggarkan dari MAK 52 dan MAK 57 serta Belanja Modal Tidak Menghasilkan Aset Tetap</p> <p>PNBP/Pungutan Kementerian Lembaga (KL) yang Tidak Disetorkan ke Kas Negara, Tidak dilaporkan dan Digunakan Langsung Tanpa Melalui Mekanisme APBN.</p> <p>Terdapat sisa uang belanja lauk pauk pegawai dari bulan Januari s/d Desember.</p> <p>Sekitar 50.000 Instansi/Lembaga/Perorangan penerima Bantuan Sosial belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan pertahun anggaran.</p> <p>Pertanggungjawaban Belanja tidak lengkap, realisasi belanja negara belum/tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.</p> <p>Tunjangan Profesi dan Tagihan Beasiswa kurang dibayar.</p> <p>Harga Eceran Tertinggi atas buku teks pelajaran hasil Pengalihan Hak Cipta belum ditetapkan sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan berpotensi pemborosan.</p> <p>PNBP BLU belum disahkan.</p>	<p>5.2. KEUANGAN & ANGGARAN LRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solusi pedoman sistem tatacara kerja anggaran dan kapitalisasi aset ke dalam neraca, program aplikasi kapitalisasi AT dan ATB dengan berbagai pengendalian-pencegahan salah klasifikasi, pelatihan karyawan perbendaharaan untuk kapitalisasi, penilaian kinerja SDM. 2. Pelatihan bersama bendahara & akuntansi , pedoman pembuatan CALK untuk PNBP tak disetor ke Kas Negara & dilaporkan, penggunaan langsung PNBP, jurnal akuntansi pelanggaran tersebut, lebih bayar, kurang bayar, pembayaran tanpa bukti memadai, dan tanda-tanda khusus pelanggaran dalam LO, LAK, LRA dll. 3. Pelatihan pembuatan CALK untuk sisa belanja, bukti pendukung realisasi belanja, penggunaan berbagai standar harga bagi belanja seperti Harga Eceran Tertinggi dan sumber patokduga resmi yang lain.
--	--	--

	<p>Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum belum memadai.</p> <p>Tujuan pengalihan Hak Cipta Buku Teks Pelajaran oleh Pusat Perbukuan untuk buku murah tidak tercapai.</p> <p>Mekanisme penggunaan rekening Rektor untuk menampung dana Kerjasama/ Beasiswa tidak memadai.</p> <p>Realisasi belanja tidak didukung bukti yang lengkap.</p> <p>6. PENDAPATAN</p> <p>6.1. AKUNTANSI PENDAPATAN</p> <p>Pencatatan dan pelaporan PNBK kementerian tertentu belum memadai untuk memastikan keakuratan PNBK yang dilaporkan.</p> <p>Tidak seluruh Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dapat diinput.</p> <p>6.2. KEUANGAN & ANGGARAN PENDAPATAN</p> <p>Jasa giro dan pendapatan terlambat diterima pada berbagai PT.</p>	<p>6. PENDAPATAN</p> <p>6.1. AKUNTANSI PENDAPATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KL harus memperoleh petunjuk BPK mengenai hal-hal belum memadai dalam pencatatan & pelaporan PNBK, revisi pedoman pencatatan & pelaporan PNBK sesuai petunjuk BPK, pelatihan pedoman baru kepada karyawan. 2. Identifikasi sebab SSBP tak dapat di input, pelatihan pembuatan SSBP kepada seluruh petugas ybs. <p>6.2. KEUANGAN & ANGGARAN PENDAPATAN</p> <p>Praktik sehat dan kualitas SDM, tak ada usulan.</p>
--	---	---

	<p>Universitas melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) bidang pendidikan tahun dengan beberapa kabupaten/kota terdapat PKS yang belum dilunasi.</p> <p>Tertundanya penerimaan negara atas jasa giro.</p> <p>7. PIUTANG</p> <p>7.1. AKUNTANSI</p> <p>Pengelolaan dan Pencatatan Piutang belum memadai. Belum ada SOP penentuan piutang di PTN.</p> <p>7.2. KEUANGAN & ANGGARAN</p> <p>Pengelolaan piutang tidak memadai.</p>	<p>7. PIUTANG</p> <p>7.1. AKUNTANSI</p> <p>1. Pembangun sftware aplikasi piutang berbasis Bultek Piutang SAP.</p> <p>7.2. KEUANGAN & ANGGARAN</p> <p>1. Penerapan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan piutang negara.</p>
--	--	---

6. STRATEGI IMPLEMENTASI PP 71 FULL ACRUAL

- Strategi implementasi sejalan dengan strategi transisi SAI menjadi SAKTI-SPAN, terfokus pada pos-pos LK terpenting seperti
 - Akualisasi akuntansi beban SDM cq gaji, tunjangan, THR dll.
 - Pemantapan berbagai aplikasi berbasis metode perpetual untuk akuntansi persediaan.
 - Memasukkan beban penyusutan AT dan beban amortisasi ATB, penyisihan dan penghapusan aset keuangan.
 - Akuntansi piutang berbasis subsidiary ledger piutang secara real time, akuntansi dana bergulir, penerusan pinjaman atau semacamnya.
 - Akuntansi utang berbasis subsidiary ledger utang secara real time, termasuk utang penerusan pinjaman.
 - Akuntansi selisih kurs, keuntungan – kerugian investasi atau penyertaan pemerintah.
 - Akuntansi hibah, pertukaran aset (barter, tukar guling), ganti rugi, bantuan sosial berbentuk barang modal atau barang lain yang diperoleh dari belanja barang.
 - Akuntansi pendapatan akrual
 - Akuntansi beban akrual, disamping beban penyusutan AT dan amortisasi ATB.
 - Dan lain-lain.
- Strategi perubahan perangkat lunak aplikasi untuk perlakuan akuntansi berbasis CTA menjadi perangkat lunak akuntansi full acrual terintegrasi harmonis dengan Pusat Layanan Bersama SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) berbasis rekonsiliasi periodik Itjen, Satker, KPPN dan Dit.APK Depkeu, terkoordinasi dengan baik dengan BPK terkait opini LKPP 2012 (SAI) & 2013 (SAKTI).
- Meningkatkan peran Itjen dalam (1) memerangi temuan-perkecualian BPK 2009-2010, (2) audit pengendalian akuntansi sepanjang masa transisi CTA kepada akrual paripurna.
- Eksploitasi keunggulan sistem akuntansi akrual paripurna. Internal marketing cq program keyakinan internal KL tentang manfaat jangka panjang akuntansi berbasis akrual.
- Pelatihan penggunaan-pemanfaatan informasi akrual paripurna bagi pengawasan-pengendalian dan pengambilan keputusan sehari-hari.
- Program sosialisasi manfaat LK Akrual kepada para pengguna LK, misalnya DPR/DPRD.
- Pengaitan LK Akrual dengan Laporan Kinerja KL.
- Strategi tinggal landas yang mulus (*smooth take off strategy*), strategi menghindari gempa bumi pergantian sistem CTA dengan sistem full acrual yang berisiko penurunan raihan opini LK yang diperoleh dari BPK.
- Strategi pemberesan berkelanjutan berbagai temuan pemeriksaan BPK atas LK, sesuai paragraf tersebut diatas (Strategi Memerangi Perkecualian, Strategi Merebut Opini WTP).
- Peluncuran Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berlaku Nasional (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), diikuti berbagai kegiatan sosialisasi Departemen Keuangan Dan Depdagri kepada pengguna Pedoman.
- Strategi pendalaman terus-menerus oleh Dit.APK tentang manajemen DIPA, manajemen komitmen & status pagu anggaran, manajemen pembayaran beraplikasi

keuangan terintegrasi Satker-KPPN-Bank, manajemen penerimaan terkait sistem MPN G2, standardisasi rekening koran dan sinkronisasi proses bisnis dengan unit Eselon 1 lain, manajemen kas, sistem Oracle BUN, sistem SAKTI untuk Satker, sistem konversi dan sortir data.

- Sebaliknya para karyawan perbendaharaan mendapat pelatihan intensif untuk memahami sistem akuntansi akrual Dit.APK, penggunaan database tunggal pada BUN, penyusunan LK Konsolidasian dan membangun komitmen seluruh karyawan keuangan untuk meraih WTP.
- Strategi membangun komitmen, mengurangi bahkan menghapus resistensi terhadap reformasi akuntansi tahap II (CTA menjadi Full Accrual).

7. STRATEGI MEMBANGUN KOMITMEN

- Untuk hal yang mudah, pelaksanaan santai saja, tak perlu berbasis komitmen. Untuk hal yang sulit, dibutuhkan komitmen; konsisten & fokus pada sasaran, semangat, sikap pantang menyerah terhadap hambatan dan kesediaan berkorban untuk mencapai target sasaran.
- Komitmen adalah tentang sikap konsisten & serius dalam sebuah periode jangka panjang.
- Komitmen adalah penyatuan berbagai tugas pokok dan fungsi, lebur menuju satu tujuan, misalnya mencapai raihan LK Pemerintah Pusat berkualitas tinggi, beropini BPK tertinggi. Karena opini BPK untuk LK PP secara keseluruhan tergantung pada opini BPK terhadap LK masing-masing KL, maka KL berhasil meraih WTP peduli penuh atas opini belum WTP KL yang lain, dan berkomitmen membantu secara optimal.
- Komitmen terdiri atas komitmen kelembagaan dan komitmen individual, harus dibangun bersama-sama. Komitmen individu pemimpin merupakan patok-duga seluruh karyawan, akan diteladani oleh seluruh karyawan. Komitmen seremonial harus dihindari, komitmen adalah tentang kebangkitan semangat juang. Pidato tanpa ruh komitmen (tanpa semangat berjuang) dari atasan dengan mudah ditangkap hadirin, dan hadirin tak akan bangkit semangatnya.
- Pembangunan komitmen adalah upaya Rakernas Akuntansi untuk menghapus pilihan atau alternative strategy & action-plan, menghasilkan **sebuah strategi tunggal** yang akan dilakukan bersama-sama oleh K/L dan Pemda.
- Komitmen adalah kebulatan tekad bersama, untuk mengatasi masalah sulit bersama-sama.
- Komitmen diproksi oleh komitmen anggaran, penyediaan anggaran memadai untuk menjamin sukses implementasi PP 71 adalah komitmen APBN/D.
- Komitmen adalah segala upaya perencanaan dan pelaksanaan rencana secara amat berkualitas untuk memperoleh kepastian pencapaian target sasaran.
- Komitmen adalah segala upaya memperlancar jalan menuju sasaran sesuai jadwal, segala upaya & kegiatan harian untuk memerangi hambatan menuju sasaran Implementasi PP 71 dengan sukses.
- Komitmen berarti meninggalkan sikap kompromistis, pembangunan komitmen dalam Rakernas Akuntansi adalah aksi mengajak, membangkitkan semangat atau meninggalkan mereka yang selalu pesimis, ragu dan tidak percaya diri mampu mencapai sasaran.
- Komitmen berarti persetujuan Rakernas bahwa strategi & solusi akuntansi dipastikan akan dilaksanakan tanpa ragu & sepenuh hati oleh seluruh K/L dan Pemda.

- Komitmen harus dipelihara, karena akan layu dan dilupakan setelah Rakernas Akuntansi.
- Komitmen berarti supervise berbasis target, jadwal tagihan pelaksanaan rencana implementasi PP 71 kepada penerima tugas secara berkala, imbalan dan hukuman bagi pelaksanaan rencana.
- Komitmen adalah tentang raihan kinerja akuntansi berkualitas dengan kecepatan penuh, rasa percaya diri penuh, sebuah gaya manajemen sadar bingkai waktu dan skedul selesai.
- Komitmen adalah sikap tidak putus asa apabila kesulitan menghadang, mencari solusi memecahkan hambatan, konsisten menuju sasaran mingguan dan bulanan akuntansi.
- Komitmen berarti atensi 100% sepanjang hari kerja, rapat harian dan evaluasi harian kinerja akuntansi.
- Komitmen adalah kebulatan tekad mencapai sasaran, berakhir dengan perasaan bahagia tatkala sasaran tercapai, perasaan geram dan sedih tatkala sasaran harian atau mingguan tak tercapai. Perasaan geram adalah kebangkitan semangat & komitmen lebih besar untuk berkinerja lebih baik. Petugas nirkomitmen menyebut hambatan eksternal sebagai alasan mengapa target harian atau mingguan akuntansi tak tercapai, menyebabkan target besar WTP 2011 dan Implementasi Akrua Paripurna 2015 tak tercapai. Sebuah instrumen kecil malafungsi, menyebabkan sebuah mobil tak dapat berfungsi.
- Komitmen adalah tentang diri kita sendiri, tanpa syarat apapun.

8. PENUTUP

Makalah sederhana disajikan untuk meramaikan diskusi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sidang Komisi IV Rakernas Akuntansi 2011.

*Jakarta, 14 September 2011.
Jan Hoesada.*